

Akuntabilitas Pendidikan di Indonesia: Peluang dan Tantangan

Arismunandar^{1*}, Nuri Emmiyati², Naurah Jinan³

^{1,2}Universitas Negeri Makassar, Indonesia, email: arismunandar@umm.ac.id

³Naurah Jinan, University of Malaya, email: s2031805@siswa.um.edu.my

Info Artikel

Diajukan: 12/3/2025

Diterima: 05/4/2025

Diterbitkan: 15/08/2025

Keyword:

*accountability, education quality,
financial transparency, BOS funds*

Abstract

Educational accountability in Indonesia involves two key dimensions: quality accountability. Financial accountability focuses on transparent an of education funds, notably the School Operational Assistance (BOS) p helps build public trust. Quality accountability ensures that students achie competency standards through tools like school quality reports and accr paper highlights challenges such as limited financial literacy among school ; unclear accountability standards, top-down management practices, an monitoring systems. Despite these issues, there are notable opportunities: of school committees and education councils, media attention on ed support from public accounting firms, and the growing adoption of di systems. Strengthening accountability requires clearer regulations, ongoi engagement, capacity building, and integrated evaluation systems. Fut recommended to assess the real-world effectiveness of accountability meas supporting a more transparent and high-quality education system in Indon

PENDAHULUAN

Era desentralisasi dan demokrasi yang melanda Indonesia membawa dampak signifikan terhadap sistem pendidikan, terutama dalam hal akuntabilitas. Akuntabilitas pendidikan menjadi penting untuk memastikan penggunaan dana pendidikan yang transparan dan efisien, sekaligus meningkatkan mutu lulusan (Suryana, 2020; Ramadhani et al., 2024). Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memenuhi harapan masyarakat (Tarigan, 2023; Hasanah et al., 2024).

Akuntabilitas pendidikan sendiri mencakup dua dimensi utama: keuangan, yang berfokus pada pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya secara terbuka; dan mutu, yang berkaitan dengan standar

proses serta hasil pendidikan, termasuk relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja (Dien et al., 2022; Karwono & Susetyo, 2021). Kedua dimensi ini saling melengkapi: keuangan yang dikelola dengan baik akan mendukung tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik.

Kerangka akuntabilitas pendidikan di Indonesia didukung oleh sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kewajiban lembaga pendidikan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Selain itu, terdapat Permendikbudristek No.40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mewajibkan penyusunan perencanaan kinerja, pelaporan, dan evaluasi untuk mendukung transparansi dan perbaikan mutu berkelanjutan. Regulasi ini menjadi dasar hukum penting untuk memastikan agar akuntabilitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterapkan secara sistematis di tingkat pusat hingga satuan pendidikan.

Orientasi pengelolaan pendidikan saat ini menitikberatkan pada upaya menciptakan pelayanan yang optimal untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan akuntabilitas sebagai salah satu pilar utama. Perubahan orientasi ini didorong oleh beberapa faktor: pertama, adanya otonomi daerah yang membuat peran pemerintah pusat dalam pengawasan pendidikan semakin kecil, sehingga pendekatan *top-down* dinilai kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Kedua, meningkatnya kesadaran dan partisipasi *stakeholders* Pendidikan, seperti orang tua dan Masyarakat, yang menuntut bentuk pengawasan baru yang lebih berorientasi kepada kepentingan mereka, bukan hanya kepada atasan birokrasi. Ketiga,

mendesaknya kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, yang menuntut adanya mekanisme akuntabilitas agar lembaga pendidikan bertanggung jawab dalam mencapai visi, misi, dan tujuan mereka.

Namun demikian, masih banyak permasalahan mendesak terkait akuntabilitas pendidikan di Indonesia. Berbagai keresahan masyarakat muncul, antara lain: desakan agar pemerintah benar-benar mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan; rendahnya transparansi penggunaan dana pendidikan yang memicu ketidakpercayaan publik (Manguma et al., 2020; Nur & Murwaningsari, 2020); serta pungutan sekolah yang tidak jelas tujuannya. Selain itu, mutu lulusan juga sering dinilai belum sesuai harapan dan tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja (Hasanah et al., 2024; Karwono & Susetyo, 2021), yang berkontribusi pada tingginya angka pengangguran. Kebijakan seperti Ujian Akhir Nasional yang kurang disosialisasikan menimbulkan pro dan kontra; dugaan praktik KKN dalam penerimaan siswa baru; konflik kewenangan antara komite sekolah dan kepala sekolah; serta peran dewan pendidikan yang belum optimal juga memperkuat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Pamungkas et al., 2024; Sofi et al., 2022).

Dalam konteks demokrasi dan partisipasi, akuntabilitas pendidikan seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Suryadi (2003) menekankan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah perlu memainkan peran penting sebagai wakil masyarakat untuk memastikan lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana, mutu pendidikan, serta hasil belajar siswa.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, praktik, peluang, dan tantangan akuntabilitas keuangan dan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui analisis komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang realistis untuk memperkuat akuntabilitas pendidikan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kondisi saat ini.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei. Dengan Subjek Sekolah strategis dalam hal ini kebijakan BOS menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung akuntabilitas keuangan di satuan pendidikan. Melalui BOS, sekolah di tingkat dasar dan menengah diwajibkan menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang selanjutnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Aslindah & Mulawarman, 2022; Pusvitasari et al., 2024). Audit BPK tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, tetapi juga memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa dana publik dikelola secara tepat sasaran dan sesuai standar.

Selanjutnya, keterlibatan komite sekolah dan dewan pendidikan membuka peluang besar untuk memperkuat pengawasan dan transparansi. Komite sekolah, yang mewakili orang tua dan masyarakat, berperan dalam memantau pengelolaan dana pendidikan dan memberi masukan terkait perencanaan serta penggunaan anggaran (Komariyah et al., 2022; Irawan et al., 2021). Pemberdayaan komite sekolah sebagai mitra strategis kepala sekolah dapat meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung tercapainya mutu pendidikan yang lebih baik (Wilian et al., 2021). Dalam konteks ini,

kolaborasi antara pihak sekolah, komite, dan dinas pendidikan menjadi kunci agar akuntabilitas berjalan optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhatian media massa terhadap isu-isu pendidikan di Indonesia juga menjadi peluang penting untuk mendorong akuntabilitas. Media massa membantu menyebarluaskan informasi positif maupun negatif terkait praktik pengelolaan pendidikan, sehingga memicu keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan publik (Ramadhani et al., 2024). Peran media sebagai saluran komunikasi sekaligus alat kontrol sosial ini menjadikan isu akuntabilitas lebih terbuka dan lebih diperhatikan.

Peluang lain yang dapat dimanfaatkan yaitu keberadaan lembaga-lembaga akuntan publik. Sekolah dapat menggunakan jasa akuntan publik untuk membantu proses audit internal maupun eksternal, sehingga hasilnya lebih mendalam dan profesional. Kehadiran lembaga-lembaga ini memperkuat transparansi, akurasi, dan kredibilitas laporan keuangan sekolah.

Di sisi lain, tersedianya berbagai layanan informasi berbasis teknologi informasi memberikan kemudahan akses antara sekolah dan *stakeholders* pendidikan. Sistem pelaporan daring dan aplikasi berbasis data memungkinkan masyarakat untuk memantau pengelolaan dana secara *real-time* (Dien et al., 2022; Subadre et al., 2023). Teknologi informasi juga memfasilitasi komunikasi dua arah antara sekolah dan publik, yang dapat memperkuat kepercayaan dan transparansi.

Dengan demikian, peluang-peluang ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan nyata dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan pendidikan di Indonesia, penerapan kebijakan BOS,

pemberdayaan komite sekolah, dukungan media massa, keberadaan lembaga akuntan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat secara signifikan memperkuat sistem akuntabilitas. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, media, dan pihak profesional diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Peluang dan praktik akuntabilitas mutu pendidikan di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai inisiatif yang diupayakan dalam sistem pendidikan, termasuk penerapan Kurikulum Merdeka, pelaporan rapor mutu sekolah, akreditasi, serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* lokal. Pertama, Kurikulum Merdeka berfokus pada capaian kompetensi siswa dan memberikan kebebasan kepada sekolah dalam mengatur dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal masing-masing (Iskandar et al., 2024; Martanto, 2024). Dengan pendekatan ini, sekolah diajak untuk bertanggung jawab atas hasil belajar siswa, serta mendorong inovasi dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih relevan dan efektif (Iskandar et al., 2024).

Selanjutnya, rapor mutu sekolah dan akreditasi menjadi alat penting dalam menilai dan memastikan akuntabilitas mutu pendidikan. Rapor mutu memberikan gambaran menyeluruh tentang performa sekolah pada berbagai aspek, termasuk hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, dan dukungan sarana prasarana (Sofiani et al., 2024). Akreditasi, di sisi lain, bertujuan untuk menilai kelayakan dan kualitas sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh otoritas pendidikan, sehingga mendorong sekolah untuk terus memperbaiki diri (Iskandar et al., 2024). Sistem akreditasi yang transparan juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam

pengawasan mutu pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas tersebut.

Lebih jauh lagi, peran masyarakat dan *stakeholder* lokal dalam akuntabilitas mutu pendidikan sangat signifikan. Keterlibatan komunitas, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya memberikan perspektif yang berharga dalam evaluasi dan perbaikan kualitas pendidikan (Muzakir & Suastra, 2024). Partisipasi masyarakat tidak hanya menguatkan sistem pengawasan, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran dengan mengaitkan isu-isu lokal dan budaya setempat ke dalam kurikulum, sehingga menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih responsif (Ericha & Rahardi, 2023).

Selain itu, terdapat sejumlah kondisi eksternal yang memperkuat optimisme pelaksanaan akuntabilitas mutu pendidikan di Indonesia. Tingginya perhatian media massa terhadap isu-isu pendidikan membantu menyebarkan informasi, baik positif maupun negatif, sehingga meningkatkan kesadaran publik dan mendorong transparansi. Terbentuknya komite sekolah dan dewan pendidikan memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan pihak sekolah. Tersedianya lembaga-lembaga akuntan publik juga membuka peluang bagi sekolah yang ingin memastikan pengelolaan keuangan yang lebih profesional. Di samping itu, kemajuan teknologi dan ketersediaan berbagai layanan informasi memudahkan akses data antara sekolah dan *stakeholder* pendidikan, yang pada akhirnya memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Secara garis besar, peluang-peluang ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas mutu pendidikan di Indonesia memerlukan

sinergi antara kebijakan pendidikan yang adaptif, evaluasi yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dan *stakeholder*. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk membangun sistem pendidikan yang lebih akuntabel, responsif, dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, demi meningkatkan kompetensi dan kualitas lulusan (Saputro, 2024; Maola et al., 2021).

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menegaskan perlunya integrasi antara penegakan hukum, peningkatan kapasitas manajerial, literasi keuangan, serta pembaruan regulasi dalam membangun sistem pengelolaan keuangan pendidikan yang transparan dan bertanggung jawab. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan strategis yang dapat menjawab tantangan tersebut, demi terciptanya pendidikan yang lebih akuntabel dan dipercaya publik.

Tantangan akuntabilitas mutu pendidikan di Indonesia mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dan ditangani secara sistematis. Pertama, belum adanya standar baku yang jelas mengenai apa saja yang harus dipertanggungjawabkan dalam konteks akuntabilitas mutu pendidikan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam evaluasi kualitas pendidikan karena pihak-pihak terkait, seperti sekolah dan pemerintah, kesulitan menetapkan tolok ukur yang seragam (Prasetya et al., 2022; Ali & Nuryani, 2023). Sebagai contoh, upaya untuk meningkatkan mutu lulusan memerlukan manajemen pendidikan yang lebih terstruktur dan perencanaan yang matang. Namun tanpa adanya standar yang tegas, pencapaian tersebut menjadi sulit diukur secara objektif (Ali & Nuryani, 2023). Kondisi ini semakin kompleks karena di banyak daerah belum ada peraturan daerah

yang secara eksplisit mengatur standar pertanggungjawaban sekolah kepada para *stakeholder*, sehingga setiap sekolah menerapkan standar yang berbeda.

Kemudian, keterbatasan data dan lemahnya sistem monitoring hasil belajar menjadi hambatan signifikan. Data yang akurat dan lengkap sangat penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (Nurhayati & Rahmat, 2023; Noly et al., 2022). Namun, monitoring yang masih belum terintegrasi dan tidak dilakukan secara berkesinambungan membuat lembaga pendidikan kesulitan menyusun laporan kemajuan yang dapat dipertanggungjawabkan (Anwar & Setiawan, 2020). Selain itu, audit formal yang biasanya hanya dilakukan sekali setahun oleh auditor eksternal cenderung bersifat administratif, kurang mendalami aspek *kemengapaannya*, dan dilakukan setelah kegiatan selesai. Hal ini menyebabkan perbaikan sulit dilakukan secara tepat waktu. Oleh karena itu, penguatan audit internal yang dilakukan secara lebih rutin dan kontekstual oleh pimpinan atau tim internal sekolah sangat penting agar potensi penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Rendahnya partisipasi aktif masyarakat juga menjadi tantangan berkelanjutan. Meskipun terbentuk komite sekolah sebagai perwakilan masyarakat, masih banyak orang tua dan warga yang enggan terlibat langsung dan menyerahkan seluruh pengawasan kepada komite tersebut. Rendahnya keterlibatan ini dapat menyebabkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan kurang mendapat dukungan dan masukan dari pihak yang paling terdampak (Syafi'i et al., 2023; Jasmine, 2023). Untuk itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya, mentalitas warga sekolah yang terbiasa dengan cara-cara lama juga menjadi hambatan. Budaya kerja yang kaku dan resistensi terhadap inovasi membuat penerapan akuntabilitas yang transparan tidak selalu diterima dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sosialisasi dan perubahan budaya organisasi agar nilai-nilai akuntabilitas dapat menjadi bagian dari praktik keseharian di sekolah.

Terakhir, konsekuensi transparansi adalah keterbukaan data dan informasi yang dapat menimbulkan persoalan baru, seperti potensi pelanggaran privasi atau gangguan terhadap otonomi profesional guru dan staf sekolah. Oleh sebab itu, sangat penting adanya regulasi atau pedoman operasional yang melindungi hak-hak pribadi dan profesional warga sekolah, sekaligus memastikan keterbukaan tetap berjalan.

Tantangan-tantangan di atas menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas mutu pendidikan di Indonesia tidak hanya membutuhkan regulasi dan standar yang jelas, tetapi juga penguatan budaya akuntabilitas, pelatihan pengelolaan mutu, audit internal yang lebih adaptif, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Dengan menangani tantangan ini secara terpadu, diharapkan mutu pendidikan nasional dapat terus meningkat dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

Secara umum, tantangan akuntabilitas dalam pendidikan di Indonesia mencakup beberapa elemen penting yang saling berkaitan, yaitu mentalitas, konflik peran, dan keterbatasan sumber daya. Pertama, mentalitas yang masih cenderung *top-down* menjadi kendala serius dalam penerapan akuntabilitas. Pendekatan ini menekankan kontrol ketat dari atas ke bawah, yang sering kali mengabaikan kontribusi aktif guru, siswa, dan orang tua sebagai pemangku kepentingan pendidikan (Inawati et al., 2023).

Struktur organisasi yang berlapis dan birokratis dapat menghambat inovasi, menurunkan motivasi partisipasi, dan pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat (Natasyah, 2023).

Konflik peran antara komite sekolah, kepala sekolah, dan dinas pendidikan juga menambah kompleksitas permasalahan akuntabilitas. Ketika pembagian tugas dan tanggung jawab tidak dirumuskan secara jelas, atau ketika pemahaman peran antar pihak tidak selaras, potensi konflik meningkat (Wulandari et al., 2023). Misalnya, komite sekolah bisa merasa kurang dilibatkan oleh kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah dapat merasa komite sekolah tidak berkontribusi optimal. Keterpaduan yang lemah ini akhirnya menghambat pencapaian tujuan pendidikan dan menurunkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan (Selamet et al., 2022).

Tantangan signifikan juga ditemukan dalam keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Banyak sekolah di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam hal kompetensi guru, staf administrasi, serta kapasitas manajerial (Widiadi, 2022). Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional berdampak langsung pada rendahnya mutu pembelajaran dan lemahnya sistem akuntabilitas. Di sisi lain, keterbatasan akses dan pemanfaatan teknologi informasi membatasi kemampuan sekolah dalam menerapkan manajemen data yang transparan dan pembelajaran berbasis digital (Adam et al., 2022).

Tantangan-tantangan tersebut menegaskan perlunya pendekatan holistik yang mencakup penguatan budaya akuntabilitas di semua level, klarifikasi peran dan tanggung jawab setiap pihak, serta investasi yang berkelanjutan pada pengembangan SDM dan teknologi pendidikan. Dengan

upaya yang terintegrasi, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat mewujudkan akuntabilitas yang lebih kuat dan berdampak positif bagi mutu pendidikan dan kepuasan masyarakat.

Keterkaitan antara akuntabilitas keuangan dan mutu pendidikan sangat erat dan vital dalam proses peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penggunaan dana yang transparan, seperti dana BOS memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan dana memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau serta mengawasi alokasi dan penggunaannya secara efektif (Aisah et al., 2024; Nurhayati & Rahmat, 2023). Dengan adanya akses informasi yang terbuka mengenai penggunaan dana, sekolah dapat membangun kepercayaan dengan orang tua dan masyarakat, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung proses pendidikan (Anwar et al., 2025).

Contoh konkret dari hubungan ini dapat dilihat pada penggunaan dana BOS untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Dana BOS diharapkan dapat dialokasikan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti buku pelajaran, alat peraga pembelajaran, hingga perbaikan ruang kelas. Peningkatan fasilitas ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap hasil belajar siswa (Mafazi & Ahmad, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang mampu mengelola dana secara efektif dan transparan umumnya mencatatkan hasil belajar siswa yang lebih baik dibandingkan sekolah yang tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut (Akbar, 2023; Siswanto et al., 2024).

Selain itu, penting untuk menerapkan akuntabilitas secara integratif, yakni meliputi pengelolaan dana, proses pendidikan, dan hasil akhir yang dicapai. Akuntabilitas tidak hanya sekadar memastikan bagaimana dana digunakan, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran berlangsung serta sejauh mana hasil belajar siswa sesuai dengan standar yang ditetapkan (Cahayati & Rizqa, 2024; Subekti et al., 2023). Pendekatan integratif ini memungkinkan semua elemen dalam sistem pendidikan untuk dievaluasi secara menyeluruh, sehingga upaya peningkatan mutu dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Dengan demikian, untuk memaksimalkan dampak positif penggunaan dana pendidikan seperti BOS, diperlukan pendekatan akuntabilitas yang menyeluruh—melibatkan transparansi, efisiensi, serta integrasi antara dana, proses, dan hasil. Melalui langkah-langkah ini, mutu pendidikan di Indonesia diharapkan dapat meningkat secara signifikan, menjawab tantangan yang ada, dan memenuhi harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pendidikan di Indonesia harus dibangun secara integratif, mencakup dua dimensi utama, yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas mutu pendidikan. Keduanya saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Akuntabilitas keuangan memastikan bahwa dana pendidikan, seperti BOS dan sumber pendanaan lainnya, digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai regulasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sementara itu, akuntabilitas mutu pendidikan menekankan pada pencapaian hasil belajar siswa, kepuasan *stakeholder*, relevansi lulusan, serta pencapaian standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.

Prinsip transparansi dan partisipasi menjadi kunci utama dalam pelaksanaan akuntabilitas pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan pemantauan yang lebih baik oleh masyarakat, orang tua, dan pemangku kepentingan lain, sedangkan partisipasi aktif mereka memperkuat fungsi pengawasan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Keberadaan komite sekolah dan dewan pendidikan, perhatian media massa terhadap isu-isu pendidikan, serta kemajuan teknologi informasi yang mendukung pelaporan daring menjadi peluang positif yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik.

KESIMPULAN

Untuk menjawab tantangan tersebut, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan:

1. Perumusan dan penegakan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi mengenai akuntabilitas pendidikan, termasuk standar minimal apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap sekolah kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat didukung dengan penyusunan peraturan daerah yang kontekstual sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
2. Penguatan kapasitas dan literasi keuangan bagi kepala sekolah, bendahara, guru, dan pengelola pendidikan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan, sehingga mereka mampu merencanakan, mengelola, dan melaporkan penggunaan dana pendidikan secara transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya akuntabilitas pendidikan dan partisipasi mereka

dalam pengawasan, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mutu pendidikan.

4. Pengembangan dan pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan berbasis teknologi, seperti rapor mutu sekolah digital, aplikasi pelaporan BOS daring, dan platform evaluasi pembelajaran yang dapat diakses publik.
5. Penguatan audit internal dan audit eksternal, termasuk memanfaatkan jasa akuntan publik dan memperbaiki proses audit agar lebih mendalam, terjadwal, serta mampu mengevaluasi tidak hanya angka, tetapi juga konteks penyimpangan atau kendala yang terjadi.
6. Mendorong keterlibatan aktif media massa dan organisasi masyarakat sipil untuk mengawasi, mempublikasikan, dan memberikan masukan terhadap kinerja sekolah dan penggunaan dana pendidikan, sehingga tercipta ekosistem kontrol sosial yang sehat.

REFERENCE

- Akbar, F. (2023). Penggunaan media pembelajaran untuk siswa dan berhubungan dengan kualitas mutu pendidikan.. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rmhvc>
- Ali, M. and Nuryani, L. (2023). Meningkatkan mutu lulusan dengan memaksimal fungsi manajemen pendidikan di sekolah. *Journal of Education and Teaching (Jet)*, 4(3), 324-338. <https://doi.org/10.51454/jet.v4i3.251>
- Anwar, K. and Fathoni, M. (2025). Penerapan prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana bos: implikasinya pada mutu pendidikan. *Akademika Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 319-329. <https://doi.org/10.51339/akademika.v6i2.3568>
- Anwar, S. and Setiawan, D. (2020). Suksesi akreditasi sebagai standar nasional pendidikan tinggi. *Jurnal Ilmiah Social Teknik*, 2(2), 88-103. <https://doi.org/10.46799/jequi.v2i2.5>
- Aslindah, A. and Mulawarman, W. (2022). Membangun masa depan melalui manajemen keuangan pendidikan yang efektif. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan (Jimpian)*, 2(2), 65-74. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v2i2.2606>
- Atikah, S. (2019). Peningkatan mutu pembelajaran melalui supervisi akademik berdasarkan mutu standar proses pembelajaran.. <https://doi.org/10.31227/osf.io/vdgan>
- Awaludin, A. (2017). Akreditasi sekolah sebagai suatu upaya penjaminan mutu pendidikan di indonesia. *Sap (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1). <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>

- Bisri, A. (2020). Studi analisis komite sekolah/madrasah dalam mengawal kualitas pendidikan. *Munaddhomah Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 51-64.
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v1i1.31>
- Cahayati, R. and Rizqa, M. (2024). Peran supervisi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *INTEL*, 128-135.
<https://doi.org/10.56855/intel.v3i3.1091>
- Firman, F. and Arfin, A. (2022). Efektifitas peran komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. *Journal of Education and Teaching (Jet)*, 3(2), 203-212. <https://doi.org/10.51454/jet.v3i2.187>
- Iskandar, S., Rosmana, P., Nabilah, K., Pebriyanti, P., Prayoga, R., & Faqih, A. (2024). Implementasi kurikulum merdeka sebagai upaya meminimalisir krisis sistem pendidikan indonesia. *Jurnal Sinektik*, 6(2), 106-114. <https://doi.org/10.33061/js.v6i2.9148>
- Mafazi, R. and Ahmad, M. (2024). Manajemen pembiayaan pendidikan (analisis konsep dan implikasinya dalam meningkatkan mutu pendidikan). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 232-240.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2860>
- Manguma, V., Randa, F., & Palalangan, C. (2020). Mengungkap praktik akuntabilitas dalam organisasi gereja toraja jemaat tallunglipu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 165.
<https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2328>

- Maola, P., Handak, I., Septiani, I., & Prihantini, P. (2021). Revitalisasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan di indonesia. *Aulad Journal on Early Childhood*, 4(3), 99-106.
<https://doi.org/10.31004/aulad.v4i3.186>
- Mardhiyah, M., Saputra, A., Fahrezi, D., Hasri, S., & Sohiron, S. (2023). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di sekolah dasar. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 698-705.
<https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4036>
- Martanto, W. (2024). Edukasi pembuatan paper seed dari limbah kertas dengan carbon dots pisang sebagai media pembelajaran di min 1 jembrana. *Blantika Multidisciplinary Journal*, 2(4), 364-372.
<https://doi.org/10.57096/blantika.v2i4.125>
- Mashari, M. (2021). Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penggunaan dana bos untuk pendidikan dasar yang bermutu. *Spektrum Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2506>
- Mulyadi, D. (2020). Konstruksi pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 110-132.
<https://doi.org/10.31949/jpl.v2i2.801>
- Prasetya, D., Radiana, U., Junanto, T., & Mening, H. (2022). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (spmi) dalam peningkatan mutu pendidikan di smp kristen bukit pengharapan kabupaten sanggau. *Multiverse Open Multidisciplinary Journal*, 1(2), 51-58.
<https://doi.org/10.57251/multiverse.v1i2.586>

- Purwaningsih, D. and Asriati, N. (2024). Pengelolaan keuangan pendidikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (Jppi)*, 4(4), 1723-1732. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.757>
- Suwardhiti, E., Diatmika, I., & Yuniarta, G. (2024). Pengaruh pengelolaan dan aksesibilitas laporan bos terhadap persepsi komite sekolah: akuntabilitas keuangan sebagai variabel mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(1), 21-32. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i1.75749>
- Syafi'i, A., Bahar, B., Shobicah, S., & Muharam, A. (2023). Pengukuran indeks mutu pendidikan berbasis standar nasional. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1697-1701. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i7.332>
- Syahril, S. and Sitabuana, T. (2021). Perlindungan hukum atas praktik pungutan liar di kantor pelayanan publik. *Prosiding Senapenmas*, 1423. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15214>